



KOTA SHANGHAI LOCKDOWN

IDN/ANTARA

Para pria berolahraga di kawasan perumahan tertutup saat lockdown, di tengah penyebaran penyakit virus korona (COVID-19), di Shanghai, Tiongkok, Jumat (27/5).

Perang Ukraina Rusia Bisa Picu Resesi Global

Ukraina dan Rusia adalah pemain besar dalam produksi pangan dunia.

WASHINGTON (IM) - Presiden Bank Dunia David Malpass mengatakan, perang di Ukraina dapat memicu resesi global. Konflik di sana telah mendorong kenaikan harga pangan dan energi dunia.

"Ketika kita melihat PDB (produk domestik bruto) global, sulit sekarang untuk melihat bagaimana kita menghindari resesi. Gagasan harga energi dua kali lipat sudah cukup memicu resesi dengan sendirinya," kata Malpass dalam sebuah acara yang digelar Kamar Dagang Amerika Serikat (AS), dikutip laman Sky News, Jumat (27/5).

Dia mengungkapkan, ekonomi Jerman, yang merupakan terbesar keempat di dunia, telah melambat signifikan karena kenaikan harga energi. Eropa, Tiongkok, dan AS mengalami pertumbuhan lebih lambat.

Sementara negara-negara berkembang terimbas dampak

inflasi yang lebih parah. "Perang juga telah menyebabkan kekurangan pupuk yang dapat memperburuk kondisi ekonomi di tempat lain," ucapnya.

Ukraina dan Rusia adalah pemain besar dalam produksi pangan dunia. Menurut PBB, mereka mewakili 53 persen perdagangan global minyak bungkung matahari dan biji-bijian, serta 27 persen gandum.

Di Afrika, 25 negara mengimpor lebih dari sepertiga gandum mereka dari Ukraina dan Rusia. Selain itu, Rusia dan Ukraina mengeksport 28 persen pupuk yang terbuat dari nitrogen dan fosfor, serta kalium. Konflik telah menghambat Ukraina melakukan pengiriman pasokan ke luar negeri.

Sementara sanksi Barat telah mencegat Rusia mengeksport komoditas energinya. Perang Rusia-Ukraina telah berlangsung sejak 24 Februari lalu.

Meski sudah melangsungkan beberapa putaran negosiasi, kedua negara tersebut belum bisa menyepakati perjanjian penuntasan konflik.

Sebelumnya, pakar hak asasi manusia PBB pada pekan lalu mengatakan hampir 12,8 juta orang telah mengungsi di Ukraina sejak Rusia melancarkan perangnya pada akhir Februari. Namun, sebagian besar warga masih berada di Ukraina. PBB mengeluarkan seruan untuk tindakan segera guna melindungi para pengungsi internal di Ukraina.

"Menurut perkiraan terbaru, 7,7 juta orang mengungsi akibat konflik, yang setara dengan 17,5 persen dari seluruh populasi. Orang-orang ini harus meninggalkan rumah mereka dan putus asa untuk menghindari kematian dan kehancuran. Mereka trauma dan membutuhkan perlindungan segera, termasuk dukungan psikososial," kata para ahli PBB dalam pernyataan bersama.

Badan Pengungsi PBB, UNHCR, mengatakan bahwa sejak 24 Februari, ketika Rusia melancarkan perang terhadap

tetangganya, 5.707.967 orang telah meninggalkan negara itu. Lebih dari 3,1 juta dari mereka yang melarikan diri telah pergi ke Polandia dan lebih dari 854.000 ke Rumania, lebih dari setengah juta ke Hongaria, hampir setengah juta ke Moldova, dan hampir 400.000 ke Slovakia.

Dari mereka yang melarikan diri, lebih dari 714.000 telah pergi ke atau melalui Rusia. "Konflik ini telah menyebabkan penderitaan manusia yang ekstrem, dengan ribuan warga sipil terbunuh dan terluka, dan tak terhitung lainnya hidup melalui pemboman dan kekerasan setiap hari," kata para ahli.

Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengatakan pada Kamis bahwa 3.280 warga sipil telah tewas dan 3.451 terluka sejak dimulainya perang, tetapi angkanya sebenarnya jauh lebih tinggi.

Para ahli mengatakan rumah, sekolah, rumah sakit, lembaga perawatan dan seluruh kota hancur. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa sejak 24 Februari, 306 seran-

gan telah terjadi di fasilitas kesehatan di Ukraina yang bertentangan dengan hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia.

Ranau dan sisa-sisa bahan peledak perang terus menimbulkan ancaman yang mengkhawatirkan bagi warga sipil, termasuk mereka yang tinggal di rumah mereka dan mereka yang melarikan diri dari konflik, kata para ahli.

"Berbagai bentuk kekerasan berbasis gender dilaporkan, seperti eksploitasi dan pelecehan seksual dan kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual terkait konflik," kata mereka.

Para ahli PBB termasuk Cecilia Jimenez-Damary, pelapor khusus untuk pengungsi internal; Claudia Mahler, seorang ahli independen tentang hak asasi manusia lanjut usia; Gerard Quinn, pelapor khusus penyandang disabilitas; Michael Fakhri, pelapor khusus hak atas pangan; Reem Alsalem, pelapor khusus tentang kekerasan terhadap perempuan; dan Siobhán Mullally, pelapor khusus untuk perdagangan manusia. ● tom

Rusia Pecat 115 Tentaranya karena Menolak Perang di Ukraina

MOSKOW (IM) - Pengadilan Rusia mengonfirmasi pemecatan 115 tentara Garda Nasional setelah menolak untuk ambil bagian dalam operasi militer Moskow di Ukraina. Ratusan prajurit itu awalnya menentang pemecatan dan mengajukan banding, namun pengadilan membela keputusan pemerintah.

Kasus tersebut menjadi konfirmasi resmi pertama dari tentara yang menolak bergabung dengan kampanye militer Rusia di Ukraina yang diluncurkan pada 24 Februari. Rusia selama ini menolak narasi invasi atau perang atas tindakannya di Ukraina, melainkan menggunakan narasi operasi militer khusus. Operasi militer itu untuk membasmi apa yang disebut Moskow sebagai "neo-Nazi" di Ukraina.

Sebuah pengadilan militer di Kabardino-Balkaria,

setelah Rusia, mengatakan pada hari Kamis (26/5) bahwa pihaknya memeriksa dokumen yang diperlukan dan menandai pejabat Garda Nasional pasukan keamanan domestik yang terpisah dari Angkatan Darat Rusia.

"Disimpulkan bahwa para terdakwa secara sewenang-wenang menolak untuk melakukan tugas resmi dan pengadilan menolak banding mereka," bunyi putusan pengadilan. "Sidang diadakan di balik pintu tertutup untuk menghindari pengungkapan rahasia militer," imbuh pengadilan, seperti dikutip dari AFP, Jumat (27/5).

Mengutip layanan pers pengadilan, kantor berita Interfax melaporkan pada hari Kamis bahwa para prajurit menolak untuk melaksanakan tugas terkait dengan operasi militer khusus Moskow di Ukraina. ● gul

PBB Minta Taliban Batalkan Pembatasan terhadap Perempuan

KABUL (IM) - Utusan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Afghanistan mengatakan, negara itu menghadapi tantangan "berat" hak asasi manusia dan meminta otoritas Taliban untuk membatalkan berbagai pembatasan terhadap perempuan.

Pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di Afghanistan Richard Bennett berbicara kepada wartawan pada akhir kunjungan 11 hari ke negara itu, Kamis (26/5). "Saya mendesak pihak berwenang untuk mengakui tantangan hak asasi manusia yang mereka hadapi dan untuk menutup kesenjangan antara kata-kata dan perbuatan mereka," kata dia, seperti dilansir dari Reuters.

Bennett menyatakan, keprihatinannya atas akses ke pendidikan setelah Taliban urung untuk mengizinkan anak-anak perempuan kembali ke sekolah menengah pada Maret dan bulan ini mengumumkan bahwa perempuan harus menutupi wajah mereka. Pelanggaran atas aturan tersebut adalah hukuman bagi kerabat laki-laki terdekat mereka.

"Petunjuk tentang mahram, pengekang hijab yang ketat, dan nasihat yang kuat untuk tinggal di rumah memberi pola pemisahan gender

yang mutlak dan membuat perempuan tidak terlihat di masyarakat," ujar Bennett.

Wakil juru bicara Taliban Inamullah Samangani membantah keprihatinan atas situasi hak asasi manusia di Afghanistan. Dia mengatakan pihak berwenang telah memperhatikan masalah yang disebutkan dan sedang menangani masalah pendidikan menengah anak perempuan.

Bennett juga menyerukan penyelidikan atas serangan yang menargetkan minoritas agama Syiah dan Sufi di Afghanistan, sebuah tren yang menurutnya memiliki "ciri-ciri kejahatan terhadap kemanusiaan".

Beberapa bulan terakhir telah terjadi lebih banyak serangan terhadap masjid dan sasaran sipil lainnya, yang beberapa di antaranya telah diklaim oleh ISIS.

Kelompok gerilyawan itu mengatakan berada di balik tiga ledakan di kota utara Mazar-i-Sharif pada Rabu (25/5) yang menewaskan sedikitnya 15 orang di daerah-daerah yang didominasi Syiah.

Ledakan lain, yang tidak diklaim, pada hari yang sama menghancurkan sebuah masjid Sunni di Ibu Kota Kabul dan menewaskan sedikitnya lima orang. ● ans

Presiden Mesir Minta Warganya Makan Daun Usai Harga Pangan Naik

KAIRO (IM) - Presiden Mesir, Abdel Fattah Al-Sisi mengejutkan publik setelah merilis pernyataan yang menganjurkan rakyatnya makan daun-daunan pasca terjadinya lonjakan harga bahan pangan di wilayah setempat. Ia bahkan menghubungkan anjurannya ini dengan tindakan yang pernah dilakukan Nabi Muhammad.

"Sisi mengatakan dirinya tidak khawatir jika seseorang akan mengatakan bahwa satu kilogram okra berharga 100 Pounds Mesir karena warga Mesir menyadari bahwa 'para Sahabat Nabi (SAW) terjebak dengan Rasulullah di pinggir Mekah selama tiga tahun hingga mereka makan daun. Mereka tidak meminta makanan kepada Rasulullah atau agar Bumi meledak dari bawah mereka (dengan kekayaan)," demikian seperti disampaikan Al Jazeera Mesir via seperti dilansir Middle East Monitor, Jumat (27/5).

Cuitan itu merujuk pada keputungan terhadap Muslim oleh Quraish, yang berakhir dengan istri pertama Nabi Muhammad SAW, Khadijah, meninggal dan mereka kehilangan semua kekayaan mereka. Tahun itu dikenal sebagai Tahun Kesedihan dan merupakan tahun terburuk dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW.

Al-Sisi dalam pernyataannya menyebut bahwa pada masa itu, umat Muslim tidak mengeluh. Dia pun menyarankan agar warga Mesir bersabar dan tidak menuntut solusi segera.

Sebelumnya pada Maret

lalu, Mesir beralih ke Dana Moneter Internasional (IMF) untuk ketiga kalinya dalam enam tahun untuk mengajukan pinjaman seiring negara itu bergulat dengan korupsi, pandemi virus korona Covid-19 global, dan sekarang invasi Rusia ke Ukraina.

Para analis memprediksi bahwa kenaikan lebih lanjut untuk harga bahan bakar dan makanan kemungkinan besar akan memicu kerusuhan sipil di Mesir, di mana sepertiga populasi hidup di bawah garis kemiskinan.

Al-Sisi melontarkan rentetan komentar keras selama beberapa tahun terakhir, yang menurut para pengkritiknya, dimaksudkan untuk mengalihkan tanggung jawab atas kesalahan pengelolaan ekonomi dan pengeluaran dana untuk proyek-proyek besar seperti ibu kota baru, bukannya membangun kesejahteraan negara.

Tahun 2017 lalu, Al-Sisi diejek secara online karena meminta warga Mesir menyumbangkan uang receh untuk proyek amal. Dia juga meminta warga Mesir menurunkan berat badan untuk menghemat uang setelah harga buah dan sayuran meroket setelah reformasi ekonomi pemerintah memangkas subsidi makanan.

Seorang anggota dinas keamanan Mesir, Mohamed Mansour, dalam komentarnya menyebut 'tidak sopan' untuk mengeluhkan kenaikan harga dan kekurangan makanan, dan meminta warga Mesir untuk 'mengorbankan makan malam mereka' demi negara. ● gul

Kim Jong-Un Beri Nama Program Vaksinasi Covid-19 Korea Utara Ramuan Cinta Abadi

PYONGYANG (IM) - Nama yang romantis diberikan bagaimana vaksin Covid-19 pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un untuk program vaksinasi covid-19 di negaranya. Diktator di negara tersebut menamakan program itu 'ramuan cinta abadi'. Namun, sejauh ini vaksin virus Corona itu hanya tersedia untuk tentara yang bekerja pada proyek konstruksi nasional.

Program vaksin Covid-19 di Korea Utara tersebut dilaporkan oleh Radio Free Asia (RFA). Dua sumber anonim RFA, menggambarkan bagaimana kendaraan menyiarkan dan memutar pesan pengeras suara di situs vaksinasi.

Kendaraan itu menyoroti bagaimana vaksin Covid-19 adalah hadiah yang ramah dari Kim Jong-un. "Mereka memainkan pesan propaganda politik dengan keras saat ten-

tara disuntik dengan vaksin dari Tiongkok. Mereka menyebutnya sebagai vaksinasi cinta dari Yang Mulia," ujar sumber pejabat pemerintah yang tak disebutkan namanya dikutip dari Business Insider.

Sumber lain, yang merupakan seorang warga mengonfirmasikan hal tersebut.

"Sebuah kendaraan penyiaran yang muncul di situs vaksinasi secara kelas mengumumkan kehebatan sekretaris jenderal, yang telah menyiapkan 'ramuan cinta abadi' untuk mereka," tuturnya.

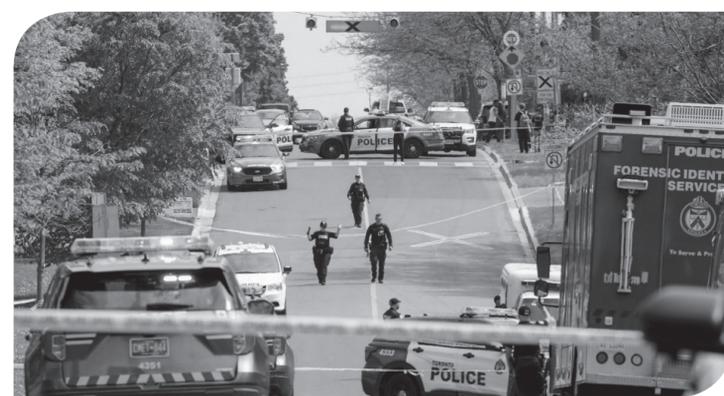
Sumber itu mengatakan vaksin covid-19 itu diimpor dari Tiongkok, tapi tak mengungkapkan secara spesifik tipe vaksinnya. Korea Utara merupakan kasus perdana Covid-19 pada 12 Mei lalu, dan langsung dengan cepat menular ke warga

negara itu yang memang tak divaksin.

Kim Jong-un telah mengkritik pejabat negaranya atas respons buruk atas virus tersebut. Para ahli sendiri khawatir wabah Covid-19 di Korea Utara akan menjadi sebuah bencana besar karena seluruh negara tak divaksin.

September lalu, Korea Utara telah menolak tiga juta dosis vaksin Sinovac pemberian Tiongkok. Mereka malah meminta Tiongkok untuk mengirimnya ke negara yang lebih membutuhkan.

Sementara itu, Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden pada pekan lalu sudah menawarkan bantuan Covid-19 kepada Korea Utara. Namun, Biden menegaskan Korea Utara sama sekali tak merespons bantuan tersebut. ● ans



KASUS PENEMBAKAN DI TORONTO - KANADA

IDN/ANTARA

Polisi bekerja di lokasi dimana polisi menembak dan melukai seorang tersangka yang berjalan di jalan kota sambil membawa pistol, saat empat sekolah yang berada di dekat lokasi dikunci, di Toronto, Ontario, Kanada, Kamis (26/5).



FESTIVAL FILM CANNES KE-75 DI PRANCIS

Aktor Tom Hanks memperlihatkan kedua telapak tangannya di samping sutradara Baz Luhrmann dan Priscilla Presley saat sesi foto untuk film "Elvis" di Festival Film Cannes ke-75 di Cannes, Prancis, Kamis (26/5).

Menteri Kesehatan Senegal Dipecat Usai Kebakaran di RS yang Menewaskan 11 Bayi

DAKAR (IM) - Presiden Senegal Macky Sall memecat menteri kesehatannya, Abdoulaye Diouf Sarr setelah 11 bayi tewas dalam kebakaran di bangsal neonatal rumah sakit.

Pada Rabu (25/5), kebakaran di bagian neonatal rumah sakit regional Mame Abdou Aziz Sy Dabakh di Kota Tivouane, sekira 120 km ibu kota Dakar, menewaskan 11 bayi di bangsal tersebut.

Presiden Sall yang sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke Angola segera menyampaikan dukanya dan belasungkawanya atas kejadian itu. Sall juga mengumumkan berkeputusan nasional selama tiga hari untuk memperingati tragedi ini.

"Saya baru saja mengetahui dengan rasa sakit dan kengerian kematian 11 bayi yang baru lahir dalam kebakaran yang terjadi di departemen neonatologi rumah

sakit Mame Abdou Aziz Sy Dabakh di Tivouane," kata Sall dalam sebuah cuitan di Twitter.

"Kepada ibu dan keluarga mereka, saya menyampaikan simpati saya yang tulus," tambah Sall.

Dalam sebuah tayangan televisi, Menteri Kesehatan Abdoulaye Diouf Sarr mengatakan bahwa penyebab kebakaran itu adalah korsleting listrik. Sarr yang sedang berada di Jenewa untuk menghadiri Majelis Kesehatan Dunia, mengatakan dia akan mempersingkat perjalanannya dan segera kembali ke Senegal.

Namun, dia kemudian dicopot dari jabatannya, menurut sebuah dekret pemerintah, pada Kamis.

Sarr akan digantikan oleh Marie Khemess Ngom Ndiaye, direktur jenderal kementerian, menurut dekret tersebut. ● gul